

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

1.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian kali ini, yaitu :

- A. Penagihan Pajak Periode 2014 – 2018
- B. Surat Paksa Pajak Periode 2014 – 2018
- C. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Periode 2014 – 2018

penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Tasikmalaya selaku unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

1.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Tasikmalaya

Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu instansi pemerintah dibawah naungan Departemen Keuangan yang mempunyai tugas penting menghimpun penerimaan Negara dari sektor Pajak yang merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional. Awal berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya adalah adanya Kantor inspeksi Keuangan Bandung yang merupakan salah satu dari sekian banyak Kantor Inspeksi Keuangan yang ada di Jawa Barat dengan wilayah kerjanya meliputi Bandung Raya, Tasikmalaya, Garut dan Ciamis. Sedangkan wilayah Tasikmalaya, Garut dan Ciamis merupakan Kantor Dinas Luar dari Inspeksi Keuangan Bandung. Mengingat luasnya wilayah kerja Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang tidak mungkin lagi dapat menjangkau wilayah yang luas dengan potensi fiskal yang cukup banyak maka Direktorat Jenderal Pajak mengambil kebijakan untuk merubah Kantor Dinas Luar Inspeksi Keuangan Bandung dikarenakan data yang ada dengan potensi fiskal daerah Priangan Timur memungkinkan untuk ditingkatkan statusnya dari Kantor Dinas Luar menjadi Kantor Inspeksi Pajak, sehingga Kantor Dinas Luar Keuangan Bandung dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Tasikmalaya dan Kantor Inspeksi Karawang pada tanggal 15 Mei tahun 1966.

Dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PGW.7-8-50 tanggal 26 Juli 1966 ditetapkan para pegawai yang dimutasikan dari Kantor Inspeksi Keuangan ke Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya, yang pada waktu itu ditanda tangani oleh Kepala Bagian Tata Laksana yang dijabat oleh Tan Boeng Liang, dengan Kepala Kantor yang pertama adalah Drs. Kanani (almarhum). Sekitar tahun 1967 Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya yang berkedudukan di Jalan Manonjaya (sekarang nama menjadi Jalan Sutisna Senjaya Nomor 154) mulai dibangun. Gedung kantor yang pada waktu dibangun merupakan gedung yang sederhana telah beberapa kali mengalami renovasi dan perbaikan. Seiring berjalannya waktu berangsur-angsur sarana dan prasarana mulai disempurnakan untuk menunjang kinerja pegawai. Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya ini membawahi antara lain Kantor Dinas Luar II Tasikmalaya di Tasikmalaya, Kantor Dinas Luar II Garut di Garut, dan Kantor Dinas Luar II Ciamis di Ciamis. Tahun 1982 mulai dibangun Kantor Dinas Luar II Tasikmalaya yang berlokasi di Jalan Pancasila Nomor 29 Tasikmalaya dan berubah nama menjadi Kantor Penyuluhan dan Penggalan Potensi Pajak (KP4). Mulai bulan Nopember 2002, KP4 tersebut pindah ke kota Banjar menjadi KP4 Banjar (Sekarang ganti nama menjadi KP2KP) yang beralamat di jalan Kamum Nomor 1 Banjar Nomor Telepon 0265-741630 yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Pajak Bandung, Drs. Lishoep Tedjasiswojo.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Mei 1989 berlaku terhitung September 1989 terjadi perubahan organisasi dari Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya. Perubahan ini dilakukan seiring dengan perubahan system pemungutan pajak dari official Assesment System menjadi Self Assesment System. Adanya perubahan ini dengan sendirinya membuat fungsi Kantor Pajak berubah dari menginspeksi menjadi melayani Wajib Pajak. Wilayah kerja Kantor Inspeksi Pajak Tasikmalaya meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis. Pada tanggal 28 Agustus 2007 seiring adanya modernisasi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya mengalami perubahan nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya dan terjadi

juga perubahan struktur organisasi yang sangat mendasar yaitu struktur organisasi Kanwil berserta KPP diubah sedemikian rupa sehingga mencerminkan prototipe institusi masa depan yang menyelenggarakan administrasi perpajakan secara modern dengan menekankan pada fungsi pelayanan dan pengawasan secara profesional sebagai perwujudan customer satisfaction dan corporate governance. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : Kep-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II.

Perubahan organisasi dengan system administasi modern adalah menyatukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP.PBB) dan Kantor Pemeriksaan Pajak (Karipka). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tasikmalaya dipecah berdasarkan wilayah kerja menjadi 3 kantor yaitu, KPP Pratama Tasikmalaya dengan wilayah kerja kabupaten Tasikmalaya dan kota Tasikmalaya , KPP Pratama Garut dengan wilayah kerja kabupaten Garut dan KPP Pratama Ciamis dengan wilayah kerja Kabupaten Ciamis dan Banjar.

Adapun urutan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- 1) Drs. Kanani (Tahun 1966-1968)
- 2) Drs.Sahuri (Tahun 1968-1971)
- 3) Drs.Subari Mangkuprawito (Tahun 1971-1974)
- 4) Drs. H.M. Ishak Ayub (Tahun 1974-1977)
- 5) Drs. Soemantor (Tahun 1977-1980)
- 6) Drs. Noerbasarota (Tahun 1980-1983)
- 7) Drs. Moch. Soechri Sasmitho (Tahun 1983-1985)
- 8) Drs. La Ode Aki (Tahun 1985-1987)
- 9) Drs. Soediharto (Tahun 1987-1989)
- 10) Drs. Henky Kailola (Tahun 1989-1992)

- 11) Drs. Djudju Djunaedi (Tahun 1992-1995)
- 12) Drs. M. Hidajat Sasmitadipraja (Tahun 1995-1998)
- 13) S. Soedarmadji, S.H (Tahun 1998-2000)
- 14) Drs. Zainuddin Lubis, Ak. Msi. (Tahun 2000-2002)
- 15) Drs. Abdul Rachman, M.M (Tahun 2002-2004)
- 16) Drs. Achmad Sobari (Tahun 2004-2005)
- 17) Drs. Herman (Kabid PPh Kanwil Jabar) (Tahun 2005-2006)
- 18) Drs. Samun Subrata (Kepala KP. PBB Tasikmalaya) Keduanya diangkat menjadi Pemangku Jabatan Sementara (Pjs.) KPP Tasikmalaya (Tahun 2006-2008)
- 19) Drs. Rusman Manik, Ak. MSc. (Tahun 2008-2009)
- 20) Drs. Pamudji, M.M (Tahun 2008-2009)
- 21) Ir. Dadang Karna Permana, M. Si (Tahun 2009-2010)
- 22) Drs. Menas Mnuhuruk (Tahun 2010-2011)
- 23) Ir. Dadang Karna Permana, Msi (Tahun 2011-sekarang)

1.1.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Tasikmalaya

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dijelaskan bahwa Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Model Lama seperti KPP Tasikmalaya, dipimpin oleh seorang kepala Kantor yang dibagi atas beberapa seksi yaitu :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Umum
3. Sekti Pengolahan Data dan Informasi
4. Seksi Tata Usaha Perpajakan
5. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi

6. Seksi Pajak Penghasilan Badan
7. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
8. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak tidak langsung lainnya.
9. Seksi penagihan
10. Seksi penerimaan dan keberatan
11. Kelompok Jabatan fungsional Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor:579/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-112/PJ./2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat mulai beroprasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kanwil DJP Jawa Barat I. Kanwil DJP Jawa barat II, memutuskan susunan organisasi KPP Pratama, Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menerapkan sistem modern yaitu adalah gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak(KPP) dan Kantor Pemeriksaan Pajak (Karipka) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (KP.PBB) seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang membawahi beberapa seksi yaitu :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Umum
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
5. Seksi Penagihan
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

9. Seksi Pemeriksaan

10. Tenaga Fungsional Pemeriksaan

Sedangkan Account Representative berada di Seksi Pengawasan dan konsultasi. Ciri-ciri khusus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern :

1. Pengawasan dan penelitian Wajib Pajak dilakukan oleh seorang Account Representative (AR), yang berada di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2. Pemeriksaan Wajib Pajak dilakukan oleh Fungsional Pemeriksaan Pajak
3. Proses pekerjaan yang harus dikerjakan dilakukan melalui workflow
4. Para pegawai pada kantor yang sudah melaksanakan modernisasi diawasi dan patuh pada kode etik pegawai.

1.1.3 Tugas KPP Pratama Tasikmalaya

A. Kantor pelayanan pajak pratama tasikmalaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional pelayanan-pelayanan dibidang PPH, PPN BM, dan PTLL, dan PBB dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan direktur jenderal pajak.

B. Kantor pelayanan pajak pratama tasikmalaya mempunyai fungsi :

- Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengalihan potensi pajak serta ekstensifikasi wajib pajak.
 - Mengamankan, menggali dan mengelola Negara disektor pajak.
- a. Kepala Kantor

Tugas Pokok : Memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Tasimalaya.

Fungsi :

1. Penetapan kebijakan operasional perkembangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

2. Pengkoordinasian dan pengendalian organisasi
3. Pembina peran serta masyarakat dan kemitraan pengembangan pelayanan pajak.
4. Penyampaian saran dan pertimbangan kepala Kantor Wilayah dalam rangka pengendalian keputusan di bidang pelaksanaan pelayanan pajak.

b. Kepala Sub Bagian Umum (Kasubbag umum)

Mengelola bidang Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga Kantor/
Dokumen / inventaris kantor Penanggung Jawab Kepala Sub. Bagian Umum

Memiliki tugas dan fungsi :

- a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan keuangan.
- c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan.

c. Seksi Pelayanan

Menerima, meneliti dan merekam surat permohonan dari Wajib Pajak, mencetak permohonan NPWP, melayani Wajib Pajak yang berkaitan dengan permasalahan perpajakan Penanggung Jawab Kepala Seksi Pelayanan.

Memiliki tugas dan fungsi :

- a. Penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan.
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
- c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- f. Kerjasama Perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Melakukan perekaman data dan validasi , Penata usahakan laporan PPAT, Perekaman data SPOP / LSPOP)Penanggung Jawab Kepala Seksi Pengolahan data dan Informasi.

Memilik tugas dan fungsi :

- a. Pengumpulan data.
- b. Pengolahan data dan validasi.
- c. Penyajian Informasi perpajakan.
- d. Perekaman dokumen perpajakan.
- e. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
- f. Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- g. Pelayanan dukungan teknis computer.
- h. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing.
- i. Penyiapan laporan kinerja.

e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Melakukan bimbingan / himbauan kepada Wajib Pajak, melakukan kunjungan Kerja ke lokasi WP dalam rangka pengawasan / pemitahiran data, membuat Profil Wajib Pajak Penanggung Jawab Kepala Seksi Waskon I, II, dan III.

Memiliki tugas dan fungsi :

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPH, PPN, PBB, BPHTB dan pajak lainnya).
- b. Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan.
- c. Penyusunan profil Wajib Pajak. d. Analisis kerja Wajib Pajak.

- e. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.
- f. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

f. Seksi Ekstensifikasi

Melaksanakan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan, melaksanakan penelitian pendahuluan pendataan , NJOP PBB Penanggung Jawab Kepala Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas dan fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan.
- b. Pendataan objek pajak dan subjek pajak.
- c. Penilaian objek pajak.
- d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Seksi Pemeriksaan

Membuat daftar / usulan Pemeriksaan Wajib Pajak yang akan diperiksa, melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan Restitusi, menyusun konsep surat permintaan kelengkapan data. Penanggung Jawab Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional

Memiliki tugas dan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan.
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- c. Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
- d. Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

h. Seksi Penagihan

Menatausahakan surat Ketetapan Pajak, SK.Keberatan , menyampaikan surat Paksa, , himbauan pelunasan Tunggakan Pajak kepada Wajib Penanggung Jawab Kepala Seksi Penagihan.

Memiliki tugas dan fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif.
- b. Penagihan piutang pajak.
- c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak.
- d. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Kelompok Fungsional

Kelompok ini terdiri atas :

- a. Pejabat Fungsional Pemeriksaan.
- b. Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

1.1.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya mempunyai fungsi pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak, mengamankan, menggali dan

mengelola Negara dari sektor Pajak. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud diatas, KPP Pratama menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensial perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak.
- b. Penelitian dan pentausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Wajib Pajak.
- c. Pengawasan, pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- e. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak berupa pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan Wajib Pajak.
- f. Mengeluarkan atau menertibkan surat-surat yang berhubungan dengan perpajakan antara lain:
 - a. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
 - b. Surat Ketetapan Pajak (SKP).
 - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
 - e. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
 - g. Melakukan penyuluhan terhadap Wajib Pajak dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak.

- h. Melakukan tindakan penagihan terhadap tunggakan-tunggakan Wajib Pajak dengan tahapan : Surat Teguran, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Pelelangan, dan Surat Paksa.
- i. Melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang dapat berupa pemeriksaan sederhana lapangan dan pemeriksaan sederhana kantor.

1.2 Metode Penelitian

1.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metodologi penelitian, yaitu seperangkat metode yang bersifat sistematis dan terorganisasi untuk menginvestasikan sebuah topic atau judul penelitian serta untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut (Leo, 2013:95)

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh dianalisis, kemudian dilakukan perhitungan terhadap data yang diperoleh dengan hal-hal tertentu yang relevan dengan teori yang ada. Studi kasus dilakukan di KPP Pratama Tasikmalaya dengan memperoleh data dari dokumen-dokumen yang ada dari tahun ke tahun untuk dijadikan bahan penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan antara variabel dependen dan independen , sehingga dapat memeberikan kesimpulan yang akan memperjelas keterkaitan antar objek yang diteliti.

1.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan tiga variable yang disesuaikan dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Ketiga variable tersebut terdiri dari dua variable independen dan satu variable dependen, sebagai berikut :

1. Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variable bebas yang tidak terikat dengan variable lainnya dan mempengaruhi variable dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

- a. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
- b. Surat Paksa pajak adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2. Variabel dependen merupakan variable yang terikat dan dapat dipengaruhi oleh variable independen. Variable dependen pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan. Penerimaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) Penerimaan Pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak. Dan Pajak Penghasilan adalah pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2016:161). Maka dapat disimpulkan penerimaan pajak penghasilan merupakan penerimaan negara dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Untuk lebih jelas mengenai variable yang sedang diteliti oleh penulis, maka dijabarkan beserta indikatornya sebagai berikut :

Tabel 1.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Satuan	Skala
Penagihan Pajak (X_1)	Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau menperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa)	a. Surat Tagihan Pajak (STP) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa)	Unit	Rasio
Surat Paksa Pajak (X_2)	Surat Paksa pajak adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. (Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)	a. Utang Pajak Tidak Dilunasi Setelah Lewat Waktu 21 Hari Sejak Diterbitkan Surat Teguran b. Biaya Penagihan Pajak (Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa)	Rupiah	Rasio

Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	Penerimaan Pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:49)	Penerimaan Pajak adalah penghasilan dari subjek pajak penghasilan (Mardiasmo, 2016:161)	Pajak Rupiah Rasio
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

1.2.3 Teknik Pengumpulan Data

1.2.3.1 Jenis Data

Dalam melaksana penelitian ini, penulis tentu membutuhkan data dan informasi yang relevan dengan variabel yang sedang diteliti. Data tersebut digunakan sebagai dasar penelitian dan demi kelancaran penelitian ini sendiri. Pada dasarnya terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang hanya diperoleh secara peninjauan langsung pada objek tersebut dengan wawancara dari sumber asli atau tangan pertama. Data yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topic suatu penelitian. Sedangkan, data sekunder menurut Nugraha (2015) adalah data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data

yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dalam pelaksanaannya, penulis akan menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau nominal. Data berupa dokumen-dokumen yang telah dikelola dan bersumber dari KPP Pratama Tasikmalaya, berupa data Jumlah Penagihan pajak, Penerbitan Surat Paksa Pajak dan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan.

1.2.3.2 Prosedur Pengumpulan Data

1. Penelitian secara langsung (*Field Reasearch*)

Penelitian yang dilakukan secara langsung di perusahaan terkait yang akan diteliti.

a. Observasi

Tehnik pengumpulan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu obyek yang akan diteliti dalam waktu singkat dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai obyek penelitian (Aldila, 2010).

b. Dokumentasi

Data-data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KPP Pratama Tasikmalaya.

2. Studi pustaka (*Library Resaerch*) bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

1.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2016:119) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 100.000 Penagihan Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya, 38.200 Surat Paksa Pajak yang beredar di KPP Pratama

Tasikmalaya dan 75.000 kali Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tasikmalaya.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:136). Dalam teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan teknik *sampling purposive*. Sugiyono (2011:84) menjelaskan bahwa: “*Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria yang digunakan yaitu :

- a. surat resmi yang telah diedarkan sehubungan dengan dilakukannya tagihan pajak periode 2014 – 2018 pada KPP Pratama Tasikmalaya
- b. surat resmi yang telah diedarkan untuk Surat Paksa Pajak periode 2014 – 2018 pada KPP Pratama Tasikmalaya
- c. penerimaan pembayaran Pajak Penghasilan yang telah diterima oleh KPP Pratama Tasikmalaya untuk penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) periode 2014 – 2018 pada KPP Pratama Tasikmalaya

yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Sampel yang digunakan oleh penulis adalah:

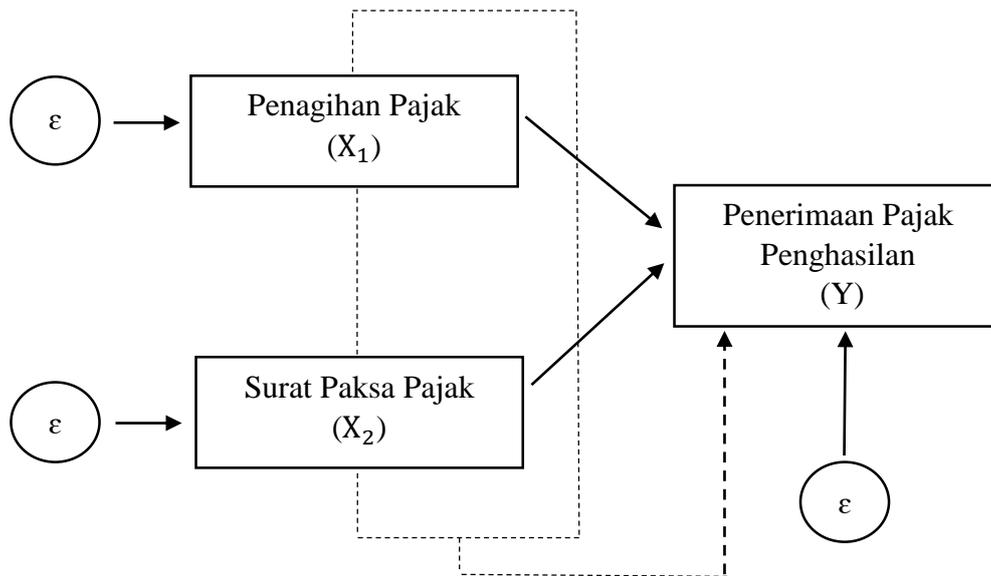
1. 71.025 Surat Tagihan Pajak (STP)
2. 7.640 Surat Paksa Pajak
3. 25.000 kali penerimaan Pajak Penghasilan

yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya selama lima tahun terakhir dari tahun 2014 – 2018.

1.4 Model Paradigma Penelitian

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah paradig variable yang terdiri dari dua variable independen (variable bebas), yang menjadi variable

independen adalah Penagihan Pajak (X_1) dan Surat Paksa Pajak (X_2). Dan satu yang menjadi variable dependen pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan (Y).



Gambar 1.1
Model Paradigma Penelitian

Keterangan :

X₁ = Penagihan Pajak

X₂ = Surat Paksa Pajak

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan

ε = Pengaruh factor lain yang tidak diteliti penulis

1.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda. Metode Analisis Regresi Linier

Berganda (multiple linear regression) adalah model regresi linear dengan 1 variabel dependen kontinu beserta k (dua atau lebih) variabel independen kontinu dan/atau kategorik (Harlan, 2018:13). Aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penagihan Pajak (X_1), Surat Paksa Pajak (X_2), terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y).

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :

1.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, perhitungan nilai minimum, maksimum, penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi ((Sugiyono, 2012) dikutip kembali oleh Effendi, 2018).

1.5.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ariawaty (2018:20) untuk data penelitian khususnya pada penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif diperlukan uji statistik uji asumsi klasik yang dimana uji tersebut akan menguji kecocokan sebuah data yang digunakan untuk di uji secara regresi ataupun secara analisis jalur. Namun di dalam analisis berganda sangat diperlukan uji asumsi klasik dengan maksud apakah data penelitian yang digunakan telah memenuhi syarat BLUE (Best, linear, unbiased, estimated)

Pengajuan dengan menggunakan regresi linear berganda dapat dilakukan apabila telah memenuhi asumsi klasik, sehingga langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengujian asumsi klasik menggunakan kotak kerja yang sama dengan uji regresi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa ada sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas, antara lain Uji Chi Kuadrat, Uji Lilliefors, Uji Kolgomorov-Smirnov dan dengan grafik (Perdana, 2016:42).

Dasar pengambilan keputusan menurut Singgih Santoso (2012:393) bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu :

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dan model regresi adalah normal.
- b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dan model regresi adalah tidak berdistribusi secara normal.

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode gambar normal Probability Plots dalam program SPSS, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Perdana, 2016:52).

Menurut Imam Ghozali (2011) yang dikutip kembali oleh Raharjo (2017) mengatakan bahwa, dalam mengetahui apakah terdapat autokorelasi dalam suatu model regresi dapat dilihat hasil *Runs Test*, dimana dasar pengambilan

keputusannya ialah apabila nilai *Asymp. Sig. (2 tailed)* lebih kecil dari 0,05 ($< 0,05$), maka terdapat gejala autokorelasi, begitupun sebaliknya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Perdana (2016:49) uji heterokedastisitas merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *scatterplot*, regresi yang tidak terjadi adalah :

- a. Titik-titik menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0.
- b. Titik-titik data tidak hanya mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.
- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

4. Uji Multikolinieritas

Menurut Perdana (2016:47) uji multikolinieritas merupakan alat uji model regresi untuk menemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Menurut Ariawaty (2018:26) Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinieritas adalah dengan melihat nilai tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF) dengan kriteria keputusan sebagai berikut :

- a. Apabila tolerance value > 0.1 dan $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independent pada model regresi.
- b. Apabila tolerance value < 0.1 dan $VIF > 10$, maka dapat disimpulkan terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independent pada model regresi.

1.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik atau turunannya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai factor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

Untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak secara parsial dan simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Tasikmalaya, dilakukan uji regresi linear berganda.

Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan.

X₁ = Penagihan Pajak.

X₂ = Surat Paksa Pajak.

b_{1,2} = Koefisien regresi dari masing-masing variable independent, dimana masing-masing mempunyai interpretasi sebagai rata-rata perubahan yang diharapkan dalam respon Y (negative/positif) per unit perubahan dalam masing-masing variable X disebut dengan *slope*.

e = Standar error, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian.

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program computer SPSS. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda, pada keempat variable penelitian tersebut dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas

dan uji multikolinieritas. Hal ini bertujuan agar hasil perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan secara tepat dan efisien.

1.5.4 Koefisien Determinasi (r^2)

Koefisien determinansi (r^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 36 satu berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen ((Ghozali, 2012: 97) dikutip kembali oleh Effendi, 2018).

Menurut Sugiyono (2010:231) yang dikutip kembali oleh Dita (2016) koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%) dengan rumus sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi yang Dikuadratkan

1.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara simultan (Uji F) dan pengujian secara parsial (Uji t).

1. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2011:98) dikutip kembali oleh Desy (2017) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan di dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Cara yang digunakan adalah dengan melihat besarnya nilai probabilitas signifikannya. Jika nilai probabilitas signifikansinya kurang dari 5% maka variabel independen akan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan langkah membandingkan dari Fhitung dengan Ftabel. Nilai Fhitung dapat dilihat dari hasil pengolahan data bagian Anova.

Langkah-langkah pengujian hipotesis simultan dengan menggunakan uji F adalah sebagai berikut :

a. Membuat formula uji hipotesis

$H_0 : \beta_1; \beta_2 = 0$ tidak terdapat pengaruh penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Tasikmalaya

$H_a : \beta_1; \beta_2 \neq 0$ terdapat pengaruh penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Tasikmalaya

b. Menentukan tingkat signifikansi

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ artinya kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kemelesetan 5%.

c. Hasil f-hitung dibandingkan dengan t-tabel, dengan kriteria :

a) Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, H_0 diterima dan H_1 ditolak.

b) Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, variabel bebas (independen) secara bersamasama berpengaruh terhadap variabel dependen, H_0 ditolak dan H_1 diterima.

d. Berdasarkan probabilitas

H_0 ditolak dan H_a diterima jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 (α).

e. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan didukung oleh teori yang sesuai dengan objek dan masalah penelitian.

2. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t dilakukan dengan langkah membandingkan dari t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} dapat dilihat dari hasil pengolahan data Coefficients. Menurut Ghazali (2011:98) dikutip kembali oleh Desy (2017) uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan sebesar 95% atau $\alpha = 5\%$.

Langkah-langkah pengujian hipotesis parsial dengan menggunakan uji t adalah sebagai berikut :

a. Membuat formula uji hipotesis

$H_0 : \rho_{YX1} = 0$ Penagihan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Tasikmalaya.

$H_a : \rho_{YX1} \neq 0$ Penagihan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Tasikmalaya.

$H_0 : \rho_{YX2} = 0$ Surat Paksa Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Tasikmalaya.

$H_a : \rho_{YX2} \neq 0$ Surat Paksa Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Tasikmalaya.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ artinya kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kemelesetan 5%.

c. Hasil t-hitung dibandingkan dengan t-tabel, dengan kriteria :

a) Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, variabel bebas (independen) secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, H_0 diterima dan H_1 ditolak.

b) Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, variabel bebas (independen) secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen, H_0 ditolak dan H_1 diterima.

d. Berdasarkan probabilitas

H_0 ditolak dan H_a diterima jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 (α).

e. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan didukung oleh teori yang sesuai dengan objek dan masalah penelitian.